

**PENGARUH PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DAN KUALITAS PERANGKAT DESA
TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DESA**

Agus Wahyudi¹⁾, Diah Anggeraini Hasri²⁾

^{1,2)}Program Studi Akuntansi dan Ekonomi Pembangunan Universitas Teknologi Sumbawa
^{1,2)}agus.wahyudi@uts.ac.id, diah.anggeraini.hasri@uts.ac.id

ABSTRACT

This study aims to examine the effect of the role of the village consultative body and the quality of village officials on the quality of village financial reports. This type of research is descriptive quantitative with an associative approach. The samples in this study were the head of the village consultative body, the village head, the village secretary, and village treasurers in the Utan District, Sumbawa Regency, so that the total number of respondents was 36 respondents. The results showed that the role of the village consultative body had an effect on the quality of village financial reports. then the quality of village officials has an effect on the quality of village financial reports.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh peran badan permusyawaratan desa dan kualitas perangkat desa terhadap kualitas laporan keuangan desa. Jenis penelitian ini yakni deskriptif kuantitatif dengan pendekatan asosiatif. Adapun sampel dalam penelitian ini yakni ketua badan permusyawaratan desa, kepala desa, sekretaris desa, dan bendahara desa di wilayah Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa, sehingga total responden yakni 36 responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran badan permusyawaratan desa berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan desa. kemudian kualitas perangkat desa berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan desa.

Kata Kunci: *peran Badan Permasyarakatan Desa ; kualitas perangkat desa, kualitas laporan keuangan desa*

1. PENDAHULUAN

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 menjelaskan bahwa laporan keuangan yang berkualitas memiliki karakteristik relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Dari hal tersebut laporan keuangan yang dibuat oleh entitas dapat menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya (Adhi dan Suhardjo, 2013).

Pemerintah Desa sebagai entitas perlu untuk menyajikan laporan keuangan guna menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Di mana desa wajib mengedepankan asas-asas pengelolaan keuangan desa mulai dari transparansi,

akuntabilitas, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pemerintah desa wajib untuk menyusun laporan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) serta laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBDes. Pengungkapan laporan keuangan kepada masyarakat dan negara (pemerintah daerah dan pemerintah pusat) digunakan sebagai bentuk penilaian atas kinerja pemerintah desa (Puspasari dan Purnama, 2018).

Adanya perangkat desa yang berkualitas perlu didukung dengan adanya peran Badan Permasyarakatan Desa (BPD). Di mana BPD berperan sebagai auditor internal desa, seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 bahwa BPD berfungsi untuk melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Fikri, *et al* (2015) menjelaskan dengan

semakin baiknya proses pengawasan yang dilakukan oleh BPD kepada pemerintah desa tentunya akan meningkatkan kualitas informasi yang terkandung dalam laporan keuangan desa.

Untuk mendukung terbentuknya laporan keuangan desa yang berkualitas perlu juga didukung dengan adanya perangkat desa yang berkualitas. Dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, perangkat desa sebagai penggerak jalannya organisasi sangatlah diperlukan. Agar terdapat perangkat desa yang berkualitas perlu adanya manajemen sumber daya manusia. Pemerintah desa sangat membutuhkan perangkat desa yang profesional dengan memiliki wawasan yang luas, kompeten dalam bidangnya, dan memiliki jiwa kompetisi yang sportif (Oktarina, *et al*, 2016).

Beranjak dari adanya fenomena yang terjadi di Kabupaten Sumbawa yakni adanya penyimpangan dalam pengelolaan dana desa, sehingga pemerintah mengambil sikap memberhentikannya secara permanen. Satu Kades di Kecamatan Utan Dipecat sebanyak satu oknum Kepala Desa (Kades) di Kecamatan Utan tepatnya Desa Tengah resmi diberhentikan secara definitif, sesuai Surat Keputusan Bupati Sumbawa. Setelah sebelumnya satu oknum Kades ini telah diberlakukan pemberhentian sementara dan diminta menyelesaikan kewajibannya (www.pulausumbawanews.net, 2019). Adanya kasus ini mempengaruhi tingkat kualitas laporan keuangan desa sehingga perlu diperbaiki baik dimulai dengan adanya perbaikan manajemen perangkat desa serta peningkatan pengawasan yang dilakukan oleh BPD. Berdasarkan hal tersebut maka tujuan dari penelitian ini ialah untuk menguji pengaruh peran badan permusyawaratan desa dan kualitas perangkat desa terhadap kualitas laporan keuangan desa pada pemerintah desa di Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengaruh Peran Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Desa

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan auditor internal dari pemerintah desa. BPD dibentuk sebagai lembaga independen dan objektif yang dirancang untuk memberi nilai tambah dan meningkatkan kualitas pemerintah desa. BPD dapat membantu pemerintah desa dalam mencapai tujuannya dengan menerapkan pendekatan yang sistematis

dan berdisiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas proses pengelolaan keuangan desa. Hasil penelitian Suherman dan Susanti (2017) menunjukkan bahwa audit internal berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa jika pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh BPD ditingkatkan, maka kualitas laporan keuangan yang dihasilkan akan lebih maksimal. Beranjak dari hal tersebut, maka peneliti menarik hipotesis sebagai berikut:

H1: Peran Badan Permusyawaratan Desa Berpengaruh Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Desa

2.2. Pengaruh Kualitas Perangkat Desa Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Desa

Perangkat desa merupakan faktor yang berpengaruh terhadap kesiapan dan efektivitas implementasi sistem akuntansi keuangan desa di lingkungan pemerintah desa. perangkat desa yang berkualitas memiliki pengetahuan dan keahlian yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas yang amanahkan kepadanya. Perangkat desa yang berkualitas akan meningkatkan kandungan nilai informasi keuangan yang disajikan. Sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Setyowati, *et al* (2016) bahwa sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, hal ini membuktikan dengan adanya perangkat desa yang berkualitas dapat meningkatkan kualitas dari laporan keuangan desa. Berdasarkan hal tersebut, sehingga peneliti menarik hipotesis yakni:

H2: Kualitas Perangkat Desa Berpengaruh Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Desa

3. METODOLOGI

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif dengan menggunakan pendekatan asosiatif. Populasi dalam penelitian ini ialah perangkat desa dan badan permusyawaratan desa. Kemudian dalam penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling, di mana peneliti menentukan kriteria dalam penyampelan yakni pihak yang terlibat langsung dalam pengelolaan keuangan desa sehingga sampel dalam penelitian ini yakni, kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa, dan ketua badan permusyawaratan desa. adapun lokasi dalam penelitian ini yakni pada desa-desa

di wilayah Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa diantaranya Desa Bale Berang, Desa Jorok, Desa Labuhan Bajo, Desa Motong, Desa Orong Bawa, Desa Pukat, Desa Sabedo, Desa Stowe Brang, dan Desa Tengah. Sehingga responden dalam penelitian ini berjumlah 36 responden.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Deskripsi Responden

Penelitian ini dilakukan pada desa-desa yang berada di Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa adapun jumlah kuesioner yang kembali dan dapat diolah sebanyak 36 kuesioner, artinya kuesioner yang kembali dan dapat diolah sama dengan kuesioner yang disebarkan. Adapun karakteristik responden seperti tertuang dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1. Karakteristik Responden

Keterangan	Jumlah	Persentase
Jenis Kelamin		
Laki-Laki	32	89%
Perempuan	4	11%
Total	36	100%
Tingkat Pendidikan		
Sekolah Menengah Pertama	3	8%
Sekolah Menengah Atas	24	67%
Diploma III	1	3%
Strata Satu	8	22%
Total	36	100%
Usia		
Generasi Z (17-25 Tahun)	1	3%
Generasi Y (26-40 Tahun)	15	41%
Generasi X (41-55 Tahun)	19	53%
>55 Tahun	1	3%
Total	36	100%
Lama Bekerja		
0-5 Tahun	17	47%
5-10 Tahun	12	33%
10-15 Tahun	7	20%
Tahun	36	100%

Sumber: Data Diolah, 2021

4.2. Hasil Penelitian

1. Uji Kualitas Data

Pengujian kualitas data dalam penelitian ini terdiri dari uji validitas dan uji reliabilitas. Di mana hasil uji validitas menunjukkan bahwa seluruh pernyataan yang digunakan oleh peneliti sejumlah 24 pernyataan dinyatakan valid. Hal ini dikarenakan r hitung dari masing-masing pernyataan lebih dari r tabel yakni 0,3202 sehingga dinyatakan valid. Kemudian hasil pengujian reliabilitas menunjukkan bahwa variabel peran badan permusyawaratan desa,

kualitas perangkat desa, dan kualitas laporan keuangan desa dinyatakan reliabel. Hal ini dikarenakan nilai *cronbach alpha* lebih dari 0,70 yakni 0,893.

2. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dalam penelitian ini terdiri dari uji normalitas, uji heteroskedastisitas, dan uji multikolonieritas. Di mana hasil uji normalitas menunjukkan bahwa data tersebut dinyatakan terdistribusi secara normal, karena nilai signifikansi lebih dari 0,05 yakni 0,156. Kemudian hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan bahwa variabel yang digunakan oleh peneliti bebas dari masalah heteroskedastisitas, karena nilai signifikansi lebih dari 0,05. Terakhir uji multikolonieritas, di mana hasilnya menunjukkan bahwa variabel yang digunakan dalam penelitian ini bebas dari masalah multikolonieritas, hal ini dikarenakan nilai toleransi lebih dari 0,1 dan nilai VIF kurang dari 10.

3. Analisis Regresi Linier Berganda

Adapun hasil analisis regresi linier berganda dalam penelitian ini seperti yang tertuang dalam persamaan di bawah ini.

$$KLK = 4,200 + 0,206PBP + 0,545KPD + e$$

Keterangan:

KLK = Kualitas Laporan Keuangan Desa
 PBP = Peran Badan Permusyawaratan Desa
 KPD = Kualitas Perangkat Desa
 e = Error/Variabel Pengganggu

persamaan regresi linier berganda tersebut bermakna yakni konstanta sebesar 4,200 artinya jika ada peran badan permusyawaratan desa dan kualitas perangkat desa yang nilainya 0, maka nilai kualitas laporan keuangan desa sebesar 4,200. Koefisien regresi variabel peran badan permusyawaratan desa sebesar 0,206 artinya bahwa setiap penambahan 1% tingkat peran badan permusyawaratan desa maka kualitas laporan keuangan desa akan meningkat sebesar 0,206. Kemudian koefisien kualitas perangkat desa sebesar 0,545 artinya bahwa setiap penambahan 1% tingkat kualitas perangkat desa maka kualitas laporan keuangan desa akan meningkat sebesar 0,545.

4. Uji Koefisien Determinasi

Uji koefisien determinasi menunjukkan bahwa nilai *adjusted R²* sebesar 0,642. Hal ini berarti sebanyak 64,2% variabel kualitas

laporan keuangan desa mampu dijelaskan oleh variabel peran badan permusyawaratan desa dan kualitas perangkat desa. kemudian sisnya sebesar 35,8% dijelaskan oleh varaiabel lain yang tidak diikut sertakan dalam penelitian ini.

5. Uji Kesesuaian Model

Uji kesesuaian model dalam penelitian ini dilihat dari nilai F dan tingkat signifikansi. Di mana hasil uji kesesuaian model menunjukkan bahwa nilai F sebesar 32,433 dengan tingkat signifikansi 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa peran badan permusyawaratan desa, kualitas perangkat desa secara serentak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan desa, dikarenakan nilai F lebih dari 4 dan tingkat signifikansinya kurang dari 0,05.

6. Uji Statistika Parameter Individual

Dibawah ini disajikan hasil uji statistika parameter individual.

Tabel 2. Hasil Uji Statistika Parameter Individual

Variabel	Nilai t	Nilai Signifikansi	Keputusan
Peran Badan Permasyarakatan Desa	2,603	0,014	Hipotesis Diterima
Kualitas Perangkat Desa	4,640	0,000	Hipotesis Diterima

Sumber: Data Diolah, 2021

Berdasarkan tabel 2 dapat dilihat bahwa variabel peran badan permusyawaratan desa memiliki nilai $t = 2,603$ dan nilai signifikansi 0,014. Hal ini menunjukkan bahwa variabel peran badan permusyawaratan desa berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan desa, dikarenakan nilai t hitung lebih dari t tabel ($t_{hitung} = 2,603 > t_{tabel} = 2,035$) dan nilai signifikansi kurang dari 0,05. Sehingga hipotesis pertama diterima.

Kemudian variabel kualitas perangkat desa memiliki nilai $t = 4,640$ dan nilai signifikansi 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa variabel kualitas perangkat desa berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan desa, dikarenakan nilai t hitung lebih dari t tabel ($t_{hitung} = 4,640 > t_{tabel} = 2,035$) dan nilai signifikansi kurang dari 0,05. Sehingga hipotesis kedua diterima.

4.3. Pembahasan

1. Hubungan Peran Badan Permasyarakatan Desa dan Kualitas Laporan Keuangan Desa

Berdasarkan hasil statistik, di mana peran Badan Permasyarakatan Desa (BPD) berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan desa sehingga hipotesis pertama diterima. Hal ini membuktikan bahwa BPD yang merupakan auditor internal dari pemerintah desa mampu memberi nilai tambah dan meningkatkan kualitas pemerintah desa dari sisi laporan keuangan desa. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Suherman dan Susanti (2017) di mana audit internal berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan. Tugas pengawasan yang dilakukan oleh BPD dapat memperkuat dan menunjang efektivitas penyelenggaraan pengelolaan keuangan desa. BPD sebagai pengawal untuk menjamin bahwa segala kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku. Peran BPD akan dapat membantu pemerintah desa dalam menyiapkan laporan keuangan pemerintah desa yang berkualitas dan handal untuk menentukan keandalan informasi keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah desa.

2. Hubungan Kualitas Perangkat Desa dan Kualitas Laporan Keuangan Desa

Berdasarkan hasil statistik, dapat dilihat bahwa kualitas perangkat desa berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan desa sehingga hipotesis kedua diterima. Di mana dengan meningkatnya kualitas perangkat desa maka laporan keuangan yang dihasilkannya semakin berkualitas. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Setyowati, *et al* (2016) bahwa sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Semakin berkualitasnya perangkat desa dalam hal pengetahuan, kemampuan, dan memiliki kompetensi di bidang keuangan maka akan semakin berkualitas pula laporan keuangan yang dihasilkan.

5. PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan bahwa peran Badan Permasyarakatan Desa (BPD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap

kualitas laporan keuangan desa. Artinya semakin independen dan objektif pengawasan yang dilakukan oleh BPD maka laporan keuangan yang dihasilkan pemerintah desa semakin berkualitas. Kemudian kualitas perangkat desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan desa. artinya adanya perangkat desa yang memiliki pengetahuan dan keahlian tentang keuangan desa akan berpengaruh terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan desa.

5.2. Saran

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti memberikan saran antara lain:

1. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk menggunakan variabel yang berbeda antara lain sistem pengendalian intern pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem informasi akuntansi yang tidak diikut sertakan dalam penelitian ini.
2. Disarankan peneliti selanjutnya dapat menambah jumlah sampel yang lebih besar serta memperluas objek penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhi, D. K., & Suhardjo, Y., 2013, *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus pada Pemerintah Kota Tual)*, Jurnal STIE Semarang, 5(3), pp. 93-111.
- Fikri, M. A., Inapty, B. A., & Martiningsih, S. P., 2015, *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kompetensi Aparatur dan Peran Audit Internal Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan dengan Sistem Pengendalian Intern sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris pada SKPD-SKPD di Pemprov. NTB)*, Simposium Nasional Akuntansi XVIII, pp. 5-76.
- Oktarina, M., Raharjo, K., & Andini, R., 2016, *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah dan Good Governance Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Di Kota Semarang (Studi Kasus Pada Dinas Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kota Semarang Tahun 2014)*, Journal of Accounting, 2(2).
- Pemerintah Indonesia, 2010, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah*. Lembaran Negara RI Tahun 2010, No. 123. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Pemerintah Indonesia, 2014, *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*. Lembaran Negara RI Tahun 2014, No. 7. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Pulausumbawanews.net, 2019, *Kasus Dana Desa, Tiga Kades di Sumbawa Dipecat*. <https://pulausumbawanews.net/2019/04/09/kasus-dana-desa-tiga-kades-di-sumbawa-dipecat/>. (diakses pada tanggal 7 Desember 2020).
- Puspasari, O. R., & Purnama, D., 2018, *Implementasi Sistem Keuangan Desa dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Desa di Kabupaten Kuningan*, Jurnal Kajian Akuntansi, 2(2), pp. 145-159.
- Setyowati, L., Isthika, W., & Pratiwi, R. D., 2016, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Semarang*, Kinerja, 20(2), pp. 179-191.
- Suherman, A., & Susanti, Y., 2017, *Pengaruh Audit Internal Terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan*, Jurnal Edukasi (Ekonomi, Pendidikan dan Akuntansi), 5(2), pp. 105-108.

